



9. Urusan Penanaman Modal

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - k) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - l) Pengelolaan dokumen SKPD
 - m) Penyediaan jasa langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya
 - b) Pengelolaan dokumen kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil data SKPD
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



- a) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM
- b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
- c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan pemerintah dan dunia usaha
- d) Peningkatan kegiatan pengendalian, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e) Penyelenggaraan pameran investasi
- f) Pembuatan materi promosi investasi
- 6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
 - a) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan
 - b) Kajian kebijakan penanaman modal
- 7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah
 - a) Kajian sumber daya yang terkait dengan investasi
 - b) Monev penguatan modal
 - c) Analisis kelayakan modal dan pengendalian dana penguatan modal
 - d) Fasilitasi pengelolaan penguatan modal
 - e) Pengelolaan administrasi dana penguatan modal

b. Capaian Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pelayanan surat menyurat selama 12 bulan, meliputi surat masuk dan keluar 2.027 lembar
 - b) Pembayaran langganan listrik, telepon, dan air selama 12 bulan
 - c) Pembayaran pengelola anggaran/keuangan sebanyak 5 orang selama 12 bulan
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan kantor 1 paket
 - e) Pemeliharaan komputer 15 unit, printer 7 unit, mesin ketik 2 unit
 - f) Penyediaan alat tulis kantor sebanyak 3 paket
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 macam
 - h) Penyediaan sarana dan prasarana instalasi listrik 9 macam



-
- i) Penyediaan makan minum rapat dan tamu untuk 352 orang
 - j) Penyediaan biaya perjalanan dinas 15 kali
 - k) Pembayaran petugas pengamanan kantor 1 orang selama 12 bulan.
 - l) Pengeloan arsip aktif 1.255 eks dan arsip in aktif 1.015 eks
 - m) Pembayaran langganan surat kabar/majalah selama 12 bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
- a) Pemeliharaan gedung 1 unit
 - b) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 2 unit dan kendaraan roda dua 5 unit
 - c) Pemeliharaan mebelair 10 unit
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Bimbingan teknis pegawai 1 kali sebanyak 23 orang
 - b) Pengelolaan kepegawaian bagi 23 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan bulanan, laporan tahunan dan LAKIP 14 laporan
 - b) Laporan keuangan 14 laporan
 - c) Dokumen perencanaan 10 buku dan dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2014 10 buku.
 - d) Profil data KP3M 10 buku
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- a) *Matchmaking* (kemitraan) usaha besar dan UKM dengan 2 perusahaan yaitu PT. Mega Andalan Kalasan (MAK) dan PT. Primissima. Hasil yang diperoleh berupa 3 UKM memasok komponen kelengkapan untuk peralatan kesehatan MAK dan 5 UKM mengambil bahan tekstil dari Primissima untuk proses pembuatan batik.
 - b) Koordinasi penanaman modal di tingkat kabupaten 15 kali, di tingkat provinsi 16 kali, dan di tingkat pusat 8 kali, serta melaksanakan forum komunikasi investasi 2 kali. Dari hasil koordinasi diperoleh sinkronisasi pelayanan perijinan antara

- pemerintah kabupaten, DIY, dan pusat, serta dari forum komunikasi diperoleh penjangkaran permasalahan di masing-masing perusahaan baik PMA maupun PMDN yang kemudian difasilitasi penyelesaiannya dengan melibatkan narasumber dari BKPM RI, Dinas Perindagkop dan KLH Kabupaten Sleman
- c) Penyelenggaraan investor gathering di Surabaya dan pengiriman misi investasi ke Singapura dan Makasar. Potensi yang ditawarkan meliputi potensi industri furniture, fashion, makanan dan minuman, agri produk, kerajinan, IT-based, ATG, dan manufaktur. Peluang investasi yang ditawarkan adalah pembangunan Waterpark and Outbound di Sumberarum, Moyudan; dan pengembangan Museum Gunungapi Merapi di Hargobinangun, Pakem.
 - d) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi 45 unit Penanaman Modal Asing (PMA) dan 35 unit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
 - e) Pameran Macau International Trade, Tourism and Investment Fair di Makau 1 kali pada tanggal 23-26 Oktober 2014, gelar potensi investasi Pameran Agrowisata Indonesia Expo 2014 dan Workshop Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi dan Peluang Arowisata di Bali 1 kali pada tanggal 19-22 September 2014, promosi melalui web 12 bulan dan promosi melalui media cetak di KABARE Jogja 1 kali
 - f) Pembuatan materi promosi investasi berupa booklet 300 buku, leaflet 300 eks, CD interaktif 300 keping, serta buku profil dan peta sebaran PMA dan PMDN 300 buku
- 6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
- a) Pelayanan perizinan bidang penanaman modal 15 izin dan sosialisasi pelayanan bidang penanaman modal 2 kali
 - b) Analisis investasi Taman Wisata Agro Bangunkerto Turi 1 dokumen dengan hasil Taman Wisata Agro Bangunkerto Turi masih menjadi obyek wisata unggulan yang berkelas dan

berkualitas yang memerlukan pembenahan sarana prasarana pendukung dan koordinasi antara pihak terkait; penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 1 dokumen yang bertujuan terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, dan penyusunan kajian akademik pemberian insentif investasi 1 dokumen yang diperlukan untuk penyusunan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sleman

- 7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah
 - a) Kajian manfaat Dana Penguatan Modal (DPM) 1 dokumen dan analisis laporan keuangan BLUD 1 laporan
 - b) Laporan pengelolaan dana penguatan modal 2 laporan, usulan estimasi kebutuhan DPM 1 laporan, koordinasi dan fasilitasi 4 kali, pemantauan bantuan modal pedagang di 18 pasar, pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal di 1 pasar, verifikasi pemohon penguatan modal sektor industri 40 pemohon dan monitoring 60 IKM, verifikasi pemohon penguatan modal sektor koperasi pada 15 koperasi dan 5 UKM, dan monitoring KUKM 15 koperasi dan 5 UKM
 - c) Berita acara penetapan penerima DPM 85 dokumen, penerimaan SK penerima DPM 86 kali 769 sasaran, serta laporan pengendalian penguatan modal 1 laporan
 - d) Penandatanganan perjanjian DPM 85 kali 753 sasaran, pelayanan informasi DPM kepada 1.142 orang, pelayanan agunan DPM 124 kali, sewa *save deposit box* 4 unit, dan forum komunikasi DPM 2 kali. Pinjaman DPM TKI sebanyak 40 orang, pemberian rekomendasi DPM TKI bagi 75 orang, dan laporan perkembangan pemanfaatan dan pengembalian pinjaman 1 laporan
 - e) Penyusunan data nominatif penerima DPM 24 buku, updating sistem komputerisasi DPM 1 paket, penyusunan data tunggakan

DPM 24 buku, validasi data DPM 2 kali, dan pengelolaan arsip DPM 2.715 eksemplar
(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana buku lampiran)
Capaian SPM bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.19. Pencapaian SPM bidang Penanaman Modal

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target nasional	Batas waktu	Target Sleman 2014	Capaian 2014
1.	Kebijakan Penanaman Modal - Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) per tahun	2014	1 (satu) per tahun	2 (dua) sektor
2.	Kerjasama Penanaman Modal - Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali
3.	Promosi Penanaman Modal - Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kab/kota	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	5 (lima) kali
4.	Pelayanan Penanaman Modal - Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	100%	2014	100%	100%
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali
6.	Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal - Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	100%	100%
7.	Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal - Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	2 (dua) kali

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Dinas Nakersos.



Pada tahun 2014 jumlah unit usaha PMA sebanyak 45 unit usaha dengan nilai investasi mencapai US\$ 231.963.752,71 mengalami kenaikan sebesar 12,17% dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2013 sebesar US\$ 206.788.265,40. Kenaikan antara lain disebabkan adanya tambahan 1 (satu) perusahaan PMA yaitu PT Es Hupindo dan adanya perluasan 2 (dua) PMA yaitu PT Sport Glove Indonesia dan PT Gameloft Indonesia. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja juga mengalami kenaikan sebesar 2,74%, yaitu dari 7.292 tenaga kerja pada tahun 2013 menjadi 7.492 tenaga kerja pada tahun 2014.

Jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2014 mencapai 45 unit usaha dengan nilai investasinya mencapai Rp1.945.866.867.158,00 meningkat 4,16% dibandingkan dengan nilai invetasi tahun 2013 sebesar Rp1.868.199.326.172,00 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.922 orang. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan 5 unit PMDN yaitu PT Serafood Indonesia, CV Tridaya Berkah Pamuji, PT Kusuma Satria Dina Sasri Wisatajaya, PT Mitra Karya Plastindo, dan PT Ardhipuri Bintang.

Perkembangan penanaman modal selama 3 tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

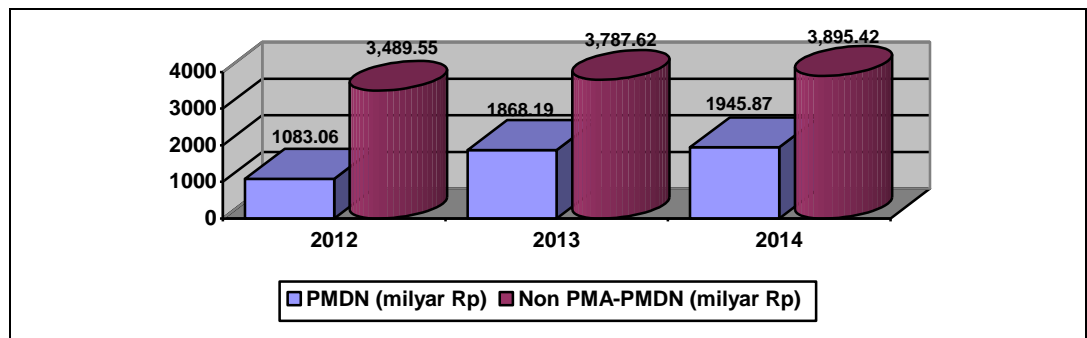
Tabel 3.20. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2012 – 2014

No	Uraian	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Unit Usaha			
	a. PMA	42	44	45
	b. PMDN	32	40	45
	c. Non PMA-PMDN	32.452	33.341	33.671
2.	Nilai Investasi			
	a. PMA (Juta US\$)	233,56	206,78	231,96
	b. PMDN (Milyar Rp)	1.083,06	1.868,19	1.945,87
	c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp)	3.489,55	3.787,62	3.895,42

1	2	3	4	5
3.	Tenaga Kerja (orang)			
	a. PMA	7.200	7.292	7.492
	b. PMDN	9.771	9.782	9.922
	c. Non PMA-PMDN	259.396	266.489	268.779

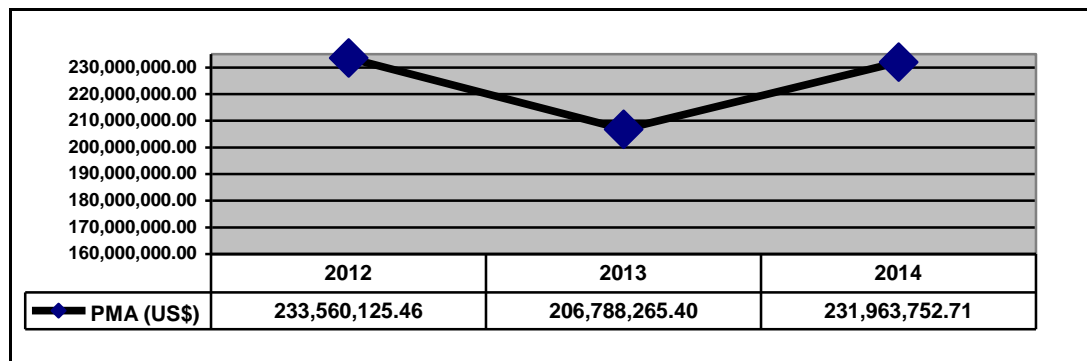
Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 3.11. Capaian Investasi PMDN & Non PMA-PMDN Tahun 2012-2014



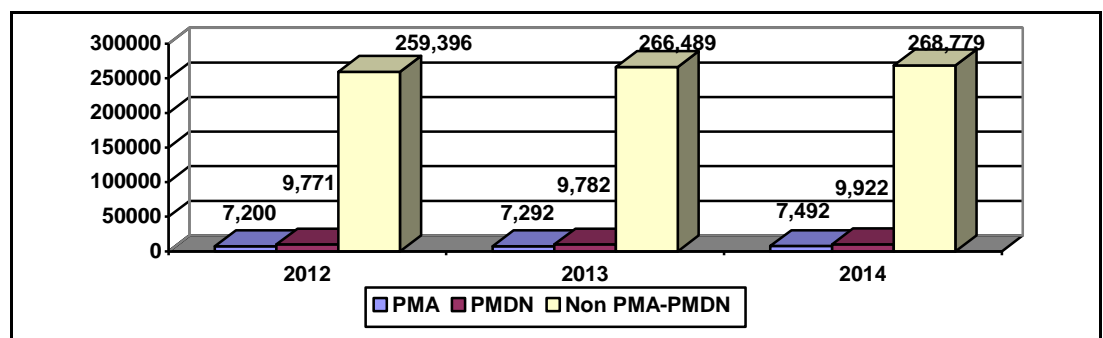
Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman

Grafik 3.12. Capaian Investasi PMA Tahun 2012-2014



Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal

Grafik 3.13. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN 2012-2014



Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal



Dana penguatan modal pada tahun 2014 sebesar Rp28.715.000.000,00 diberikan kepada 753 kelompok sasaran. Besarnya Dana Penguatan Modal tahun 2014 ini naik 28,17% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp22.403.000,00 yang diberikan kepada 745 kelompok sasaran. Sementara dana penyertaan modal tahun 2014 sebesar Rp111.839.813.477,00 naik 75,90% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp63.580.000.000,00. Bagian laba dari dana penyertaan modal tahun 2014 meningkat 17,83% dari tahun 2013, yaitu dari Rp15.491.230.879,36 pada tahun 2013 menjadi Rp23.654.901.748,21 pada tahun 2014.

Gambaran umum jumlah dana penguatan modal, dana penyertaan modal dan bagian laba dari dana penyertaan modal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.21. Jumlah Dana Penguatan Modal dan Kelompok Sasaran Tahun 2012-2014

Bidang	TAHUN					
	2012		2013		2014	
	Sasaran	DPM (000)	Sasaran	DPM (000)	Sasaran	DPM (000)
1	2	3	4	5	6	7
Ter PHK	30	207.500	31	261.500	21	208.000
CTKI	10	200.000	8	155.000	8	160.000
Lulusan Pelatihan	8	80.000	16	334.000	8	123.000
Kesejahteraan Sosial	6	188.000	8	476.500	5	213.000
Pengembangan Pariwisata	4	800.000	5	595.000	2	225.000
Perindustrian	23	738.000	26	1.032.000	21	872.000
Koperasi dan UKM	30	4.590.000	23	4.020.000	35	7.360.000
KB, PP, dan PA	192	1.395.000	255	2.380.000	153	1.595.000
Pengembangan dan Pengelolaan Pasar	22	142.000	80	1.213.500	194	3.091.500
Peternakan	57	4.648.000	50	4.088.000	51	5.910.000
TPH	158	5.225.000	144	5.152.500	158	6.167.500
Perikanan	92	2.000.000	93	2.330.000	90	2.235.000
Perkebunan	12	780.000	5	350.000	7	555.000
Kehutanan	1	50.000	1	15.000	-	-
Jumlah	645	21.043.500	745	22.403.000	753	28.715.000

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal

Tabel 3.22. Dana Penyertaan Modal Tahun 2012 – 2014

No	Uraian	TAHUN		
		2012	2013	2014
1.	BPD DIY (Juta Rp)	5.500	52.732,93	48.839,81
2.	Bank Sleman (Juta Rp)	9.298,69	8.847,07	58.000
3.	PDAM (Juta Rp)	3.000	2.000	5.000
4.	BUKP (Juta Rp)	-	-	-
	Jumlah (Juta Rp)	17.798,69	63.580	111.839,81

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal

Tabel 3.23. Bagian Laba Dana Penyertaan Modal Tahun 2012-2014

No	Uraian	TAHUN		
		2012	2013	2014
1.	BPD DIY (Juta Rp)	9.266,17	10.677,38	17.302,85
2.	Bank Sleman (Juta Rp)	3.162,89	4.214,48	5.613,58
3.	PDAM (Juta Rp)	-	282,70	426,40
4.	BUKP (Juta Rp)	300,26	376,96	312,08
	Jumlah (Juta Rp)	12.729,32	15.491,23	23.654,90

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal. Dengan didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, serta Dinas Pasar. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal berjumlah 21 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan



penanaman modal menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp2.055.223.950,00, realisasi Rp1.951.382.466,00 atau 94,95%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp187.097.000,00 realisasi Rp166.304.217,00 atau 88,89%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp91.180.000,00 realisasi Rp77.934.099,00 atau 85,47%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp37.310.000,00 realisasi Rp34.880.800,00 atau 93,49%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp98.555.000,00 realisasi Rp97.908.300,00 atau 99,34%
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, anggaran sebesar Rp645.938.950,00 realisasi Rp614.859.450,00 atau 95,19%
6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, anggaran sebesar Rp189.637.000,00 realisasi sebesar Rp169.797.000,00 atau 89,54%
7. Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah, anggaran sebesar Rp805.506.000,00 realisasi Rp789.698.600,00 atau 98,04%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan penanaman modal diawali dengan identifikasi dan inventarisasi potensi dalam rapat kerja bersama SKPD terkait sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal penyusunan rencana kerja SKPD yang dalam proses selanjutnya menjadi Renja SKPD. Pelaksanaan urusan penanaman modal melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain SKPD terkait, KADIN dan Perguruan Tinggi.



g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Masih banyak dijumpai penerima dana penguatan modal yang kurang mematuhi jadwal angsuran pinjaman yang telah disepakati, serta terdapat beberapa penerima dana penguatan modal yang tidak bisa mengembalikan pinjaman antara lain disebabkan: meninggal dunia, usahanya bangkrut/jatuh miskin, penghasilan dari usaha digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, atau pindah alamat tanpa diketahui keberadaannya. Solusi yang dilakukan adalah melakukan intensifikasi pemantauan, pendekatan dan penagihan secara intensif dan penyusunan SOP tentang penyelesaian piutang macet.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - m) Pengelolaan dokumen SKPD
 - n) Penyediaan jasa langganan



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya
 - b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil data SKPD
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - a) Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
 - b) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
 - b) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - b) Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
 - c) Fasilitasi masalah dan pembubaran koperasi bermasalah



b. Capaian Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan
 - b) Pembayaran listrik dan telepon selama 12 bulan
 - c) Pembayaran bendahara 6 orang, pembuku 1 orang, pengelola gaji 1 orang, pengelola barang 1 orang, dan pembantu 2 orang
 - d) Penyediaan sarana kebersihan kantor dan pembayaran tenaga tenaga kebersihan 12 bulan 1 PTT
 - e) Pemeliharaan peralatan kerja komputer/laptop 30 unit, mesin ketik 17 unit, AC 7 unit, jaringan LAN 1 unit, soundsystem 3 unit, kamera 4 unit dan LCD 1 unit
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 61 jenis
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 jenis
 - h) Pembuatan papan informasi 8 buah
 - i) Penyediaan buku perpustakaan 4 buah
 - j) Penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat 94 kali
 - k) Perjalanan dinas dalam daerah 179 kali dan perjalanan dinas luar daerah 19 kali.
 - l) Pembayaran jasa keamanan kantor 4 orang selama 12 bulan dan pengadaan satpam 4 orang
 - m) Penataan arsip, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dinas selama 12 bulan.
 - n) Pembayaran surat kabar 2 media selama 12 bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Rehabilitasi area parkir kantor 180 m², pengecatan marka halaman 1 kali dan sumur resapan 3 buah
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja kendaraan roda empat 5 unit, kendaraan roda dua 12 unit
 - c) Perawatan mebelair 158 unit
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a) Pengiriman personil bimtek, workshop, seminar dan lokakarya sebanyak 6 orang, pelaksanaan bimbingan penatausahaan

- keuangan daerah 80 orang, dan penyusunan kurikulum pelatihan bidang perindustrian 10 dokumen .
- b) Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian 8 buku, laporan hasil Penyusunan Angka Kredit (PAK) pejabat fungsional sebanyak 6 buku, dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 67 PNS.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Penyusunan laporan bulanan 120 buah, laporan tahunan 10 buah, LAKIP 10 buah, dan capaian kinerja 5 buah, laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas 10 buku serta monitoring kegiatan PIK 43 kegiatan
 - b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan bulanan 12 buah dan semesteran 2 buah
 - c) Laporan program kerja 10 buah, target kinerja 5 buah, renja SKPD 10 buah, DPA 10 buah, dan DPA perubahan 10 buah
 - d) Buku profil data SKPD lima tahun terakhir sebanyak 20 buah
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- a) Penyusunan Raperbup tentang pembukaan jaringan pelayanan simpan pinjam koperasi dari luar Kabupaten Sleman 1 dokumen
 - b) Formalisasi badan usaha kecil dan menengah yang diterbitkan untuk 6 koperasi, sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2008 kepada 175 koperasi
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
- a) Pelatihan kewirausahaan di Sidoluhur Godean 20 orang 3 hari 1 angkatan, di Sumberrahayu Moyudan 20 orang 3 hari 1 angkatan, di Sumberagung Moyudan 30 orang 3 hari 1 angkatan, di Kecamatan Depok 30 orang 3 hari 2 angkatan, di 5 desa se kecamatan Pakem 20 orang 3 hari 1 angkatan, dan di Wukirsari 20 orang 3 hari 1 angkatan. Pelatihan ini untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha UMKM sehingga

terjadi perubahan *mindset* berusaha untuk menjadi pengusaha yang lebih baik.

- b) Diklat karyawan koperasi untuk 60 koperasi dalam 2 angkatan masing-masing 3 hari, diklat pengawas koperasi untuk 60 koperasi dalam 2 angkatan masing-masing 3 hari, bimtek kesehatan koperasi untuk 30 koperasi 3 hari 1 angkatan, diklat pengurus koperasi untuk 60 koperasi dalam 2 angkatan masing-masing 3 hari dan pembinaan koperasi pasif sebanyak 10 koperasi. Diklat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan akuntansi bagi karyawan, pengawas, maupun pengurus koperasi. Pembinaan koperasi pasif 10 koperasi, 2 (dua) koperasi pasif berhasil menjadi koperasi aktif.

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a) Gelar potensi koperasi yang mengikutkan 6 KUKM di Kabupaten Sleman, Sarasehan Hari Koperasi 30 Koperasi, promosi tetap produk industri kecil dan menengah di *showroom* Dinas Perindagkop sebanyak 60 IKM, pasar lebaran yang mengikutkan 60 UMKM, gelar batik nusantara di Jakarta 4 pengrajin, Pameran Produk Unggulan di Jakarta 6 pengrajin, pameran keliling Dewan Kerajinan Nasional di Yogyakarta yang mengikutkan 8 orang pada pameran Text Craft, dan pameran kerajinan produk unggulan daerah Kabupaten Sleman di Jakarta yang mengikutkan 6 pengrajin. Keikutsertaan pada event-event tersebut bertujuan untuk promosi dan perluasan pasar produk UMKM baik di dalam daerah maupun di luar Kabupaten Sleman,
- b) Laporan monitoring dana penguatan modal 751 sasaran

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian bagi 200 orang
- b) Penilaian koperasi berprestasi untuk mendapatkan penghargaan koperasi award tingkat kabupaten bagi 20 koperasi yang digolongkan menjadi 4 jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa,

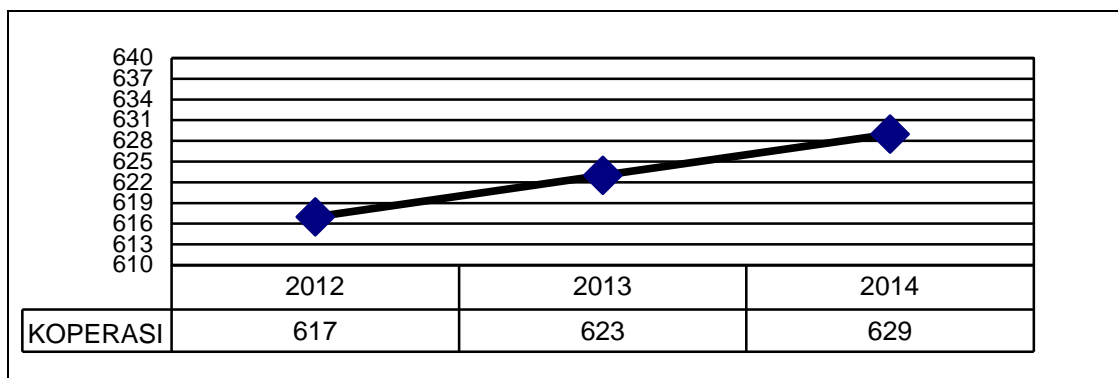
koperasi konsumen, dan koperasi produsen. Penilaian kualitas koperasi (dari aspek manajemen, organisasi, perkembangan usaha, peran koperasi terhadap lingkungan) terhadap 20 koperasi. Penetapan koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat sebanyak 145 KSP/USP, dan forum komunikasi antar koperasi sebanyak 30 orang dalam 2 angkatan

- c) Fasilitasi bagi koperasi bermasalah sebanyak 5 kasus di 5 koperasi

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran)

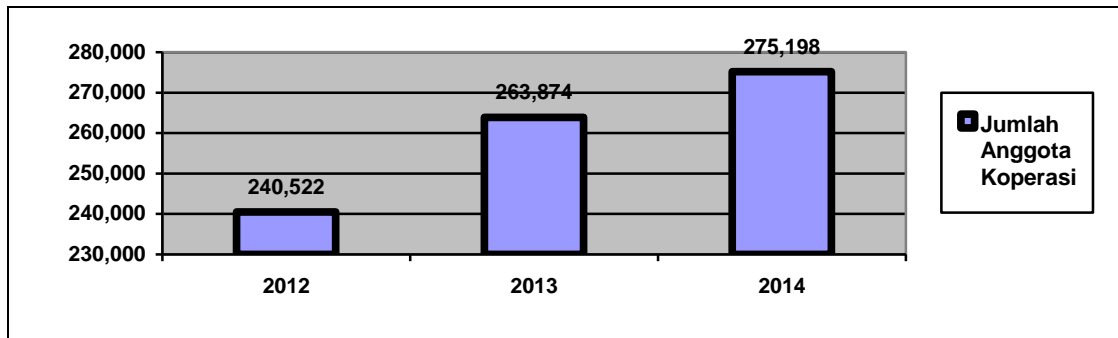
Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu meningkatkan jumlah anggota koperasi, volume usaha koperasi, dan kualitas kelembagaan koperasi. Perkembangan jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan sebesar 4,29% dari 263.874 orang pada tahun 2013 menjadi 275.198 orang pada tahun 2014. Usaha koperasi mengalami kenaikan sebesar 10,16% dari tahun 2013 sebesar Rp972.774.539.000,00 menjadi Rp1.071.650.407,00 pada tahun 2014. Jumlah koperasi mengalami kenaikan sejumlah 6 unit atau 0,96% dari 623 unit pada tahun 2013 menjadi 629 unit pada tahun 2014. Dari 629 unit koperasi pada tahun 2014 terdapat 581 unit koperasi atau 92,37% adalah koperasi aktif.

Grafik 3.14. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2012-2014



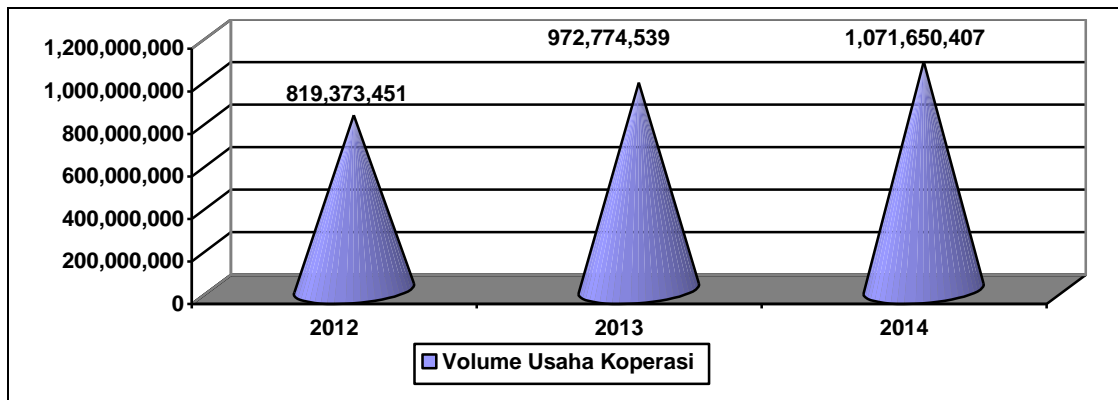
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman

Grafik 3.15. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2012-2014



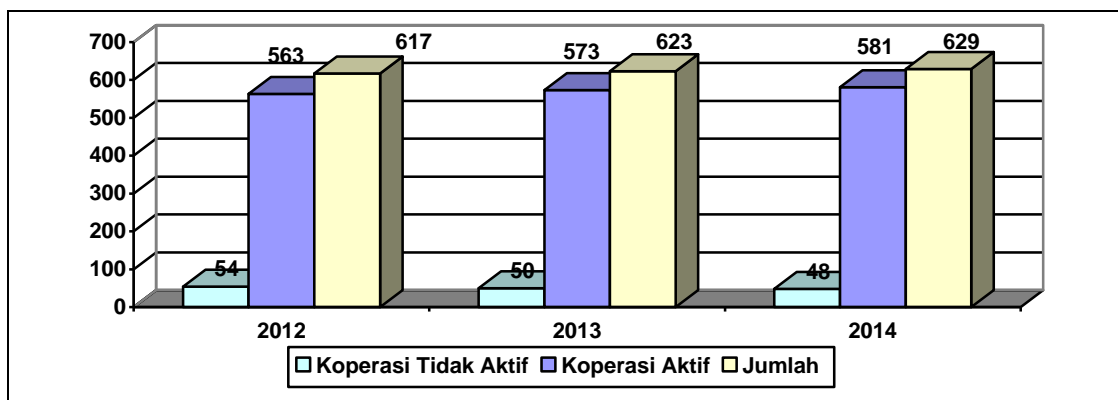
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Grafik 3.16. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2012-2014 (ribu rupiah)



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Grafik 3.17. Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif Tahun 2012-2014



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Keberhasilan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai:

1. Juara I Koperasi Berprestasi Tahun 2014 Tingkat Provinsi DIY, sekaligus sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM RI atas nama Primkopau II, dengan jenis Koperasi Jasa
2. Juara I Koperasi Berprestasi Tahun 2014 Tingkat Provinsi DIY, sekaligus sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM RI atas nama Kopkar UPN Veteran, dengan jenis koperasi konsumen
3. Juara I Koperasi Berprestasi Tahun 2014 Tingkat Provinsi DIY atas nama KSP Kartini, dengan jenis koperasi simpan pinjam
4. Juara I Tangkas Terampil Perkoperasian Tahun 2014 Tingkat Provinsi DIY atas nama Kopma UGM
5. Juara 2 Koperasi Berprestasi Tahun 2014 Tingkat Provinsi DIY atas nama KUD Seyegan, dengan jenis koperasi produsen

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di dukung oleh Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi berjumlah 34 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagaimana terlampir.



e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah sebesar Rp2.000.840.750,00 dengan realisasi sebesar Rp1.842.764.259,00 atau 92,10%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp449.333.750,00 realisasi sebesar Rp428.387.208,00 atau sebesar 95,34%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp372.976.000,00 realisasi sebesar Rp291.421.901,00 atau sebesar 78,13%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp103.174.000,00 realisasi sebesar Rp85.572.550,00 atau sebesar 82,94%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp155.100.000,00 realisasi sebesar Rp148.639.000,00 atau sebesar 95,83%.
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif anggaran sebesar Rp115.658.000,00 realisasi sebesar Rp110.053.250,00 atau sebesar 95,15%.
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp213.049.000,00 realisasi sebesar Rp209.231.000,00 atau sebesar 98,21%.
- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp450.412.000,00 realisasi sebesar Rp439.255.350,00 atau sebesar 97,52%.
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaran sebesar Rp141.138.000,00 realisasi sebesar Rp130.204.000,00 atau sebesar 92,25%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

Perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sleman melalui Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dan arahan dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).



g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Peningkatan jumlah anggota koperasi tahun 2014 lebih kecil dari tahun 2013 dikarenakan dampak dari aturan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya yang mengatur setoran pokok dan sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi. Aturan tersebut menyatakan bahwa jika anggota koperasi akan keluar dari keanggotaan koperasi, mereka tidak bisa mengambil setoran pokok. Demikian juga dengan sertifikat modal koperasi, harus dijual ke anggota lain. Aturan tersebut dirasakan memberatkan anggota koperasi sehingga menyebabkan berkurangnya minat untuk menjadi anggota koperasi.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk membentuk badan hukum koperasi serta menjadi anggota koperasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 dan aturan yang dipakai adalah kembali pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.